

RENCANA AKSI

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERINDAG

TAHUN 2026

No.	Uraian	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV
Tujuan : Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan peran koperasi, usaha mikro, industri, dan perdagangan sebagai instrumen utama dalam pengurangan kemiskinan multidimensi							
1	Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)					
1.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)					
1.1.1	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK)					
1.1.1.1	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					
	a. Pendampingan Sentra IKM	Jumlah pendampingan sentra IKM	T				2 Kali
			R	0			
			C	0%	0%	0%	0%
	b. Forum Group Discussion	Jumlah FGD yang terlaksana	T	1 Kali	3 Kali	1 Kali	3 Kali
			R	0			
			C	0%	0%	0%	0%

No.	Uraian	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV
	c. Pembayaran biaya operasional (air dan listrik) Sentra IKM Hulaan	Jumlah tagihan air dan listrik yang dibayarkan	T	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali
			R	2 Kali			
			C	0%	0%	0%	0%
	d. Pembayaran tenaga keamanan, tenaga kebersihan, dan mekanik	Jumlah biaya jasa tenaga keamanan, tenaga kebersihan, dan mekanik yang dibayarkan	T	3 Kali	3 Kali	3 Kali	
			R	0			
			C	0%	0%	0%	0%
	e. Pendaftaran merek	Jumlah merek yang terdaftar	T		10 Merek		20 Merek
			R	0			
			C	0%	0%	0%	0%
	f. Perbup RPIK	Jumlah Perbup RPIK yang tersusun	T			1 Paket	
			R	0			
			C	0%	0%	0%	0%
1.1.1.2	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					
1.1.1.3	EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri					
1.1.1.4		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri					
1.2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)					

No.	Uraian	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV
1.2.1	PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah usulan izin usaha industri dan kawasan industri yang diterbitkan atau mendapat rekomendasi					
1.2.1.1	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri					
1.2.1.2	FASILITASI VERIFIKASI PEMENUHAN PERSYARATAN/STANDAR KEGIATAN USAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN DALAM RANGKA PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS) YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASE APPROACH (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian					
	a. Pendampingan pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian	Jumlah pendampingan pemenuhan standar kegiatan usaha sektor perindustrian	T				1 Kali
			R				
			C	0%	0%	0%	0%
1.3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rasio Ketersediaan Informasi Industri (Rasio)					
1.3.1	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan data dan informasi industri yang mendukung proses perizinan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI					
1.3.1.1	PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEPATUHAN PERUSAHAAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI LINGKUP KABUPATEN/KOTA DALAM PENYAMPAIAN DATA KE SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					

No.	Uraian	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV
1.3.1.2		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota					
	a. Sosialisasi SIINas	Jumlah kegiatan sosialisasi SIINas	T				1 Kali
			R				
			C	0%	0%	0%	0%
2	Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi	Pertumbuhan Koperasi Aktif					
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)					
2.1.1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah seluruh dokumen perencanaan dan monev					
2.1.1.1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	a. Penyusunan dokumen perencanaan (12 lap.bulanan,DPA,RKA,DPPA,LPPD,LKJIP,LAKIP, 2 Lap. Semester)	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	T	13 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
			R	13 Dokumen			
			C	0%	0%	0%	0%
	b. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Forum OPD yang terlaksana	T	1 Kegiatan			
			R	1 Kegiatan			
			C	0%	0%	0%	0%
2.1.1.2	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					

No.	Uraian	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV
	a. Monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah kegiatan monev kinerja perangkat daerah	T	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
			R	4 Kegiatan			
			C	0%	0%	0%	0%
2.1.2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah pembayaran pemenuhan administrasi keuangan dinas					
2.1.2.1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					
	a. Pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama setahun	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	T	4 Bulan	4 Bulan	3 Bulan	3 Bulan
			R	4 Bulan			
			C	0%	0%	0%	0%
2.1.2.2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
	a. Pemenuhan dokumen pelaporan pengelolaan keuangan bulanan dan tahunan	Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan keuangan bulanan dan tahunan	T	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
			R	18 Dokumen			
			C	0%	0%	0%	0%
2.1.3	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan					
2.1.3.1	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					

No.	Uraian	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV
	a. Mengidentifikasi kebutuhan perjalanan dinas	Jumlah laporan identifikasi kebutuhan perjalanan dinas	T	1 Laporan			
			R	1 Laporan			
			C	0%	0%	0%	0%
	b. Menyusun laporan hasil perjalanan dinas dan menyampaikan SPJ sesuai ketentuan	Jumlah laporan hasil perjalanan dinas dan menyampaikan SPJ sesuai ketentuan	T	7 Laporan	15 Laporan	28 Laporan	10 Laporan
			R	2 Laporan			
			C	0%	0%	0%	0%
2.1.3.2	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					
	a. Perencanaan dan proses penggandaan karcis retribusi pasar, banner, box arsip	Jumlah barang cetak dan penggandaan	T		6 Buku Cek	800 Eksemplar	2.000 Eksemplar
			R				
			C	0%	0%	0%	0%
2.1.3.3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					
	a. Perencanaan dan proses pengadaan bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	T	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket
			R	6 Paket			
			C	0%	0%	0%	0%
2.1.3.4	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					

No.	Uraian	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV
	a. Mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan habis pakai	Jumlah laporan identifikasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan habis pakai	T	1 Laporan			
			R	1 Laporan			
			C	0%	0%	0%	0%
	b. Perencanaan pengadaan	Jumlah laporan perencanaan penggandaan peralatan dan perlengkapan	T	2 Laporan			
			R	2 Laporan			
			C	0%	0%	0%	0%
	c. Proses pengadaan	Jumlah laporan proses penggandaan peralatan dan perlengkapan	T	2 Laporan			
			R	2 Laporan			
			C	0%	0%	0%	0%
	d. Menyalurkan peralatan dan perlengkapan ke bidang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disalurkan ke bidang	T	21 Paket	21 Paket	21 Paket	21 Paket
			R	7 Paket			
			C	0%	0%	0%	0%
	e. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan barang	Jumlah laporan monev penggunaan barang	T	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
			R	3 Laporan			
			C	0%	0%	0%	0%
2.1.4	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah jasa pelayanan yang terbayar					
2.1.4.1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					

No.	Uraian	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV
	a. Menginventarisasi kebutuhan layanan komunikasi	Jumlah laporan inventarisasi kebutuhan layanan komunikasi	T	1 Laporan			
			R	1 Laporan			
			C	0%	0%	0%	0%
	b. Berlangganan jasa komunikasi	Jumlah dokumen berlangganan jasa komunikasi	T	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen
			R	3 Dokumen			
			C	0%	0%	0%	0%
	c. Melakukan pembayaran tagihan secara tepat waktu	Jumlah dokumen layanan komunikasi yang dibayarkan	T	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen
			R	7 Dokumen			
			C	0%	0%	0%	0%
2.1.4.2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					
	a. Mengidentifikasi kebutuhan jasa pelayanan umum	Jumlah laporan identifikasi kebutuhan jasa pelayanan umum	T	1 Laporan			
			R	1 Laporan			
			C	0%	0%	0%	0%
	b. Menyusun rencana kontrak/kerja sama untuk tenaga outsourcing	Jumlah kontrak/kerjasama untuk tenaga outsourcing	T	1 Laporan			1 Laporan
			R	1 Laporan			
			C	0%	0%	0%	0%

No.	Uraian	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV
	c. Melaksanakan pengadaan jasa sesuai ketentuan	Jumlah laporan pengadaan jasa pelayanan umum sesuai ketentuan	T	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
			R	3 Laporan			
			C	0%	0%	0%	0%
	d. Melakukan pembayaran jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan atas pembayaran jasa pelayanan umum kantor	T	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
			R	3 Laporan			
			C	0%	0%	0%	0%
2.1.5	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana dinas					
2.1.5.1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					
	a. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan rutin dan berkala	Jumlah laporan identifikasi kebutuhan pemeliharaan rutin dan berkala	T	1 Laporan			
			R	1 Laporan			
			C	0%	0%	0%	0%
	b. Melakukan pemeliharaan rutin	Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan rutin	T	1 Kendaraan	1 Kendaraan	1 Kendaraan	1 Kendaraan
			R	1 Kendaraan			
			C	0%	0%	0%	0%
	c. Pembayaran pajak kendaraan	Jumlah laporan pajak kendaraan yang dibayarkan	T	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
			R	1 Laporan			
			C	0%	0%	0%	0%

No.	Uraian	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV
2.1.5.2	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
	a. Mengidentifikasi tingkat kerusakan pada sarana dan prasarana kantor	Jumlah laporan identifikasi tingkat kerusakan pada sarana dan prasarana kantor	T	1 Laporan	1 Laporan		
			R	1 Laporan			
			C	0%	0%	0%	0%
	b. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana	Jumlah unit sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan	T		15 Unit	15 Unit	15 Unit
			R	0			
			C	0%	0%	0%	0%
2.2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)					
2.2.1	PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/USP yang telah diperiksa dan dinilai kesehatannya					
2.2.1.1	PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan					
	a. Pelaksanaan pemeriksaan atas kepatuhan koperasi dalam tata kelola dan peraturan yang berlaku	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	T	25 Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi
			R	637 Koperasi			
			C	0%	0%	0%	0%
2.3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah KSPU/U SP Koperasi Sehat (%)					

No.	Uraian	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV
2.3.1	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase KSP/USP yang telah dinilai tingkat kesehatannya					
2.3.1.1	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI MELIPUTI TATA KELOLA, PROFIL RISIKO, KINERJA KEUANGAN, DAN PERMODALAN	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan					
	a. Penilaian kesehatan koperasi untuk penghargaan hari koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	T	15 Koperasi	15 Koperasi		
			R	0			
			C	0%	0%	0%	0%
2.3.1.2	PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan					
	a. Penilaian kesehatan koperasi untuk penghargaan hari koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	T	15 Koperasi	15 Koperasi		
			R	0			
			C	0%	0%	0%	0%
2.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)					
2.4.1	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase koperasi yang menerima fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan					
2.4.1.1	PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN BAGI KELUARGA DAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG AKAN MEMBENTUK KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha					

No.	Uraian	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV
2.4.1.2	PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN BAGI KELUARGA DAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG AKAN MEMBENTUK KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan					
	a. Monev 3 tahun berjalan KDMP	Jumlah monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan KDMP	T	89 Koperasi	89 Koperasi	89 Koperasi	89 Koperasi
			R	356 Koperasi			
			C	0%	0%	0%	0%
2.4.1.3	PEMBERDAYAAN KOPERASI DENGAN KEANGGOTAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota					
	a. Monev 3 tahun berjalan KDMP	Jumlah monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan KDMP	T	89 Koperasi	89 Koperasi	89 Koperasi	89 Koperasi
			R	356 Koperasi			
			C	0%	0%	0%	0%
2.5		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program					
2.5.1		Jumlah seluruh dokumen perencanaan dan monev					
2.5.1.1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)					
2.5.1.2		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)					
2.5.2		Jumlah pembayaran pemenuhan administrasi keuangan dinas					

No.	Uraian	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV
2.5.2.1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)					
2.5.2.2		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)					
2.5.3		Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan					
2.5.3.1		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)					
2.5.3.2		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)					
2.5.3.3		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)					
2.5.3.4		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)					
2.5.3.5		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)					
2.5.4		Jumlah jasa pelayanan yang terbayar					
2.5.4.1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)					
2.5.4.2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)					
2.5.5		Jumlah pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana dinas					

No.	Uraian	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV
2.5.5.1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)					
2.5.5.2		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)					
3	Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor Lokal	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan					
3.1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase sarana perdagangan yang dipelihara					
3.1.1	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah unit sarana distribusi perdagangan yang dibangun, direvitalisasi, atau difasilitasi pengelolaannya					
3.1.1.1	FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)					
	a. Inventarisasi sarana distribusi perdagangan	Jumlah laporan inventarisasi sarana distribusi perdagangan	T	1 Laporan			
			R	1 Laporan			
			C	0%	0%	0%	0%
	b. Fasilitas dan peningkatan pengelolaan sarana distribusi	Jumlah unit pasar yang dipelihara	T			2 Pasar	
			R	0			
			C	0%	0%	0%	0%
3.1.2	PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat yang dibina					
3.1.2.1	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					

No.	Uraian	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV
	a. Sosialisasi kepada pelaku usaha di sarana perdagangan	Jumlah kegiatan sosialisasi terhadap pelaku usaha	T		1 Kali	1 Kali	1 Kali
			R	0			
			C	0%	0%	0%	0%
3.2		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi					
3.2.1	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah unit sarana distribusi perdagangan yang dibangun, direvitalisasi, atau difasilitasi pengelolaannya					
3.2.1.1	FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)					
	a. Inventarisasi sarana distribusi perdagangan	Jumlah laporan inventarisasi sarana distribusi perdagangan	T	1 Laporan			
			R	1 Laporan			
			C	0%	0%	0%	0%
	b. Fasilitasi dan peningkatan pengelolaan sarana distribusi	Jumlah unit pasar yang dipelihara	T			2 Pasar	
			R	0			
			C	0%	0%	0%	0%
3.2.2	PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat yang dibina					
3.2.2.1	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					

No.	Uraian	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV
	a. Sosialisasi kepada pelaku usaha di sarana perdagangan	Jumlah kegiatan sosialisasi terhadap pelaku usaha	T		1 Kali	1 Kali	1 Kali
			R	0			
			C	0%	0%	0%	0%
3.3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Indeks harga konsumen (Indeks)					
3.3.1	PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting dengan harga terkendali di pasar kabupaten/kota					
3.3.1.1	PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					
	a. Pemantauan harga bahan pokok dan barang penting pada pasar rakyat	Jumlah laporan pemantauan harga bahan pokok dan barang penting pada pasar rakyat	T	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
			R	12 Laporan			
			C	0%	0%	0%	0%
3.4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor (%)					
3.4.1	PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah kegiatan promosi dagang (pameran dan misi dagang) yang diselenggarakan untuk produk ekspor unggulan daerah					
3.4.1.1	MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan					

No.	Uraian	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV
	a. Fasilitasi ekspor produk UMKM & IKM; promosi dagang ke pasar nasional dan internasional; penguatan pasar rakyat & pasar online	Jumlah misi dagang yang dilaksanakan	T		1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			R	0			
			C	0%	0%	0%	0%
3.4.1.2		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang					
3.5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP berterra sah (%)					
3.5.1	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	Persentase alat UTTP (Ukuran, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) yang telah dilakukan tera, tera ulang, dan pengawasan					
3.5.1.1	PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina					
	a. Pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan metrologi legal	Jumlah pelaku usaha dalam pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan metrologi legal	T	500 Pelaku Usaha	750 Pelaku Usaha	750 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha
			R	416 Pelaku Usaha			
			C	0%	0%	0%	0%
3.5.1.2	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang					
	a. Pelaksanaan tera/tera ulang	Jumlah unit yang dilakukan tera/tera ulang	T	750 Unit	1.000 Unit	1.000 Unit	750 Unit
			R	875 Unit			
			C	0%	0%	0%	0%
4	Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif	Pertumbuhan Usaha Mikro					

No.	Uraian	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV
4.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase penyerapan Tenaga Kerja oleh Usaha Mikro (%)					
4.1.1	PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	Persentase usaha mikro yang menerima fasilitasi pemberdayaan melalui pendataan, kemitraan, perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi multipihak					
4.1.1.1	PENYUSUNAN BASIS DATA USAHA MIKRO	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata					
4.1.1.2	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan					
	a. Pelatihan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM	Jumlah pelaku usaha yang telah mengikuti pelatihan	T	50 Usaha Mikro	50 Usaha Mikro	50 Usaha Mikro	100 Usaha Mikro
			R	0			
			C	0%	0%	0%	0%
4.1.1.3	FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA MIKRO	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan					
4.1.1.4	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro					
	a. Penguatan kelembagaan UMKM, pemberian rombongan UMKM, hibah pelatihan	Jumlah pelaku usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan	T	50 Usaha Mikro	50 Usaha Mikro	50 Usaha Mikro	100 Usaha Mikro
			R	0			
			C	0%	0%	0%	0%
4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio jumlah usaha mikro terhadap total usaha yang terdaftar OSS (Rasio)					

No.	Uraian	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV
4.2.1	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	Persentase usaha mikro yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil					
4.2.1.1	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi					
	a. Kegiatan Dekranasda Fest 2026, pelatihan ketrampilan, pelatihan digital marketing, rapat	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan	T	5 Usaha Mikro	5 Usaha Mikro	10 Usaha Mikro	10 Usaha Mikro
			R	0			
			C	0%	0%	0%	0%
4.2.1.2	FASILITASI INKUBATOR USAHA MIKRO	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Inkubator					

Gresik, 2026

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. GRESIK



Drs. DARMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670803 198809 1 003